

DETERMINAN PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DENGAN MORALITAS INDIVIDU SEBAGAI MODERASI

Desi Fitriani Arang^{1*}, Suyanto², Nur Anita Chandra Putri³

^{1,2,3}Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

*email: desianifitrivivo101202@gmail.com

ABSTRACT

Purpose: This research aims to obtain empirical evidence of the influence of apparatus competence, internal control, and whistleblowing on preventing fraud in the management of village fund allocations with individual morality as a moderating variable.

Method: This quantitative research used multiple regression analysis and moderated regression analysis (MRA). The sampling method used was probability sampling, with 66 village officials in Peso Hilir District, Bulungan Regency, as respondents.

Finding: Officer competence and internal control negatively influence fraud prevention, while whistleblowing positively influences fraud prevention. Furthermore, the relationship between officer competence, internal control, and whistleblowing on fraud prevention is not strengthened.

Novelty: The discrepancy between the results and previous research motivated researchers to re-examine the consistency of these findings regarding the influence of officer competence, internal control, and whistleblowing on fraud prevention. Furthermore, they added individual morality as a moderating variable for fraud prevention.

Keywords:

Apparatus Competency, Internal Control, Whistleblowing, Individual Morality, Fraud Prevention

PENDAHULUAN

Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa merupakan aspek fundamental yang harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah desa Kusumaningrum et al. (2023). Praktik kecurangan (fraud) di lingkungan pemerintahan masih sering terjadi dan sulit ditangani secara efektif Kurniadi et al., (2022). Kecurangan tersebut tidak hanya dilakukan oleh pegawai tingkat bawah, tetapi juga melibatkan pimpinan instansi, baik secara individu maupun kolektif Kristuti et al., (2023). Sebagai bentuk pelanggaran hukum yang bertujuan memperoleh keuntungan tidak sah, tindakan ini menimbulkan ancaman serius terhadap integritas dan akuntabilitas pemerintah desa. Oleh karena itu, pencegahan kecurangan menjadi komponen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang transparan, akuntabel, serta berlandaskan prinsip moral dan religiusitas aparatur Astuti et al., (2024).

Kecurangan dalam tata kelola desa juga menjadi masalah nasional. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi di tingkat desa terus meningkat dan menempati peringkat pertama sejak tahun 2015 hingga 2021. Dalam periode tersebut tercatat 592 kasus korupsi dengan total kerugian negara sebesar Rp433,8 miliar. Kasus tersebut berlanjut pada tahun 2022 dengan 155 kasus korupsi di sektor desa, mencakup 133 kasus terkait dana desa dan 22 kasus penerimaan desa. Hasil Survei Fraud Indonesia (SFI) 2025 oleh ACFE Indonesia juga menunjukkan bahwa korupsi menjadi bentuk kecurangan paling merugikan di Indonesia dengan 47,6% responden menyatakannya sebagai jenis fraud paling berdampak. Data ini menegaskan lemahnya kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan secara akuntabel dan berintegritas.

Sebagian besar praktik kecurangan dalam pengelolaan dana desa dilakukan oleh aparatur desa sendiri Faurozan & Osmad, (2025). Kondisi ini memperlihatkan pentingnya identifikasi faktor-faktor penentu yang efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan. Pencegahan kecurangan merupakan strategi yang bertujuan menghindari perilaku tidak jujur, manipulatif, maupun penyalahgunaan wewenang yang merugikan kepentingan publik Suri Witari & Bayu Putra, (2023). Dalam konteks tersebut, peran pemerintah desa sangat penting untuk membangun sistem yang mampu mendorong budaya integritas, transparansi, dan akuntabilitas melalui kebijakan, pelatihan, dan mekanisme pengawasan yang berkelanjutan Putri et al., (2024).

Faktor pertama yang penting dalam pencegahan kecurangan adalah kompetensi aparat. Kompetensi mencakup kemampuan teknis, inovatif, dan kreatif yang memungkinkan seseorang menjalankan tugasnya secara profesional Susandya et al., (2022). Aparatur dengan kompetensi tinggi dapat mengelola dana desa secara efektif, efisien, dan sesuai prosedur Bagus Fahreza et al., (2022). Kompetensi yang baik juga membentuk birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik, bukan pada kepentingan pribadi. Sebaliknya, rendahnya kompetensi aparat dapat meningkatkan resiko penyimpangan, terutama dalam hal pelaporan keuangan dan penggunaan anggaran desa. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan pengawasan menjadi langkah krusial dalam mencegah terjadinya fraud Hasibuan et al., (2024).

Faktor kedua yang mempengaruhi pencegahan kecurangan adalah pengendalian internal. Berdasarkan konsep Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), pengendalian internal merupakan proses yang dilakukan oleh seluruh anggota organisasi untuk menjamin efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum Juliandika et al., (2024). Pelaksanaan sistem pengendalian internal yang efektif membutuhkan dukungan kebijakan, mekanisme prosedural, dan alokasi sumber daya yang memadai Rahayu et al., (2022). Dengan adanya pengawasan internal yang kuat, peluang terjadinya kecurangan dapat ditekan seminimal mungkin. Implementasi pengendalian internal yang konsisten akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa Saida et al., (2023).

Faktor ketiga yang mempengaruhi pencegahan kecurangan adalah sistem whistleblowing. Sistem ini memberikan kesempatan bagi pegawai untuk melaporkan tindakan tidak etis atau pelanggaran aturan di lingkungan kerja Kurniadi et al., (2022). Whistleblowing tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaporan, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan internal yang efektif Rahmadani et al., (2023). Keberadaan sistem ini dapat menumbuhkan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial pegawai untuk mencegah pelanggaran Affandi, (2024). Dengan menyediakan saluran pelaporan yang aman bagi whistleblower, organisasi dapat meningkatkan deteksi dini terhadap penyimpangan dan memperkuat integritas sistem pengelolaan keuangan desa Dewi et al., (2022).

Faktor keempat yang mempengaruhi pencegahan kecurangan adalah moralitas individu sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara kompetensi, pengendalian internal, whistleblowing, dan pencegahan kecurangan. Moralitas merupakan komitmen individu untuk bertindak berdasarkan nilai kebenaran dan prinsip etika yang diyakini Nurhayati, (2022). Seseorang dengan moralitas tinggi cenderung bertanggung jawab, jujur, dan adil dalam menjalankan tugasnya Taufik & Nasir, (2020). Moralitas berperan penting karena perilaku etis aparaturnya menjadi fondasi keberhasilan upaya pencegahan kecurangan. Dengan demikian, peningkatan moralitas individu akan memperkuat budaya integritas di lingkungan pemerintahan desa Saiselar et al., (2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian untuk dikaji karena kasus kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada efektivitas pembangunan dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa. Peningkatan kasus korupsi di tingkat desa menunjukkan perlunya upaya sistematis dalam memperkuat pencegahan kecurangan. Penelitian ini menarik karena tidak hanya menyoroti faktor teknis seperti kompetensi aparat, pengendalian internal, dan whistleblowing system, tetapi juga memasukkan aspek moralitas individu sebagai variabel moderasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademis dalam memahami hubungan antara kemampuan profesional, sistem pengawasan, dan nilai moral dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel dan berintegritas.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agen menurut Anthony dan Govindrajan (2007) adalah bahwa hubungan antara pemberi wewenang (*principals*) dan pelaksana (*agents*) didasarkan pada kepercayaan dan kontrak kerja, dimana *agents* diharapkan bertindak sesuai dengan kepentingan *principals*, bukan kepentingan pribadi mereka A. Y. A. Putri et al., (2024). Perbedaan hak, kewajiban, dan tujuan kedua pihak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Jensen & Mackling (1976) menegaskan bahwa laporan keuangan berperan sebagai mekanisme untuk meminimalkan konflik tersebut, karena individu cenderung bertindak berdasarkan kepentingan pribadi. Dengan penyajian laporan keuangan yang

transparan, diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan dana oleh agent, sehingga tercipta akuntabilitas dan kepercayaan antara principals dan agents.

Dalam konteks organisasi publik, principals merujuk pada masyarakat, sedangkan agents adalah pemerintah, khususnya kepala desa dan aparatur desa, yang bertugas mengelola dana desa Harahap et al., (2021). Penelitian ini relevan karena menekankan tanggung jawab pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana tidak hanya kepada pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga kepada masyarakat Rahmawati et al., (2023). Laporan keuangan yang sesuai dengan harapan pemerintah pusat mendukung efektivitas pendanaan di masa depan Nur & Urumsah, (2025), dan peningkatan kinerja pemerintah desa akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mereka, memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik.

Pengaruh Kompetensi Aparat Terhadap Pencegahan Kecurangan

Kompetensi aparatur merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh setiap individu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya secara profesional Islamiyah et al., (2020). Dalam konteks pemerintatan desa, kompetensi aparat sangat menentukan keberhasilan pengelolaan dan alokasi dana desa, sehingga mengurangi peluang terjadinya fraud atau penyalahgunaan dana Dewi et al., (2022). Penelitian yang dilakukan oleh Juliandika et al., (2024), dan Wakhidah & Mutmainah, (2021), menunjukkan bahwa kompetensi aparat berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, memperkuat akuntabilitas agent kepada principals, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Dari uraian tersebut, disusun hipotesis sebagai berikut:

H1: Kompetensi Aparat berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan

Pengendalian internal merupakan serangkaian kebijakan yang bertujuan melindungi aset organisasi dari tindakan kecurangan, menjamin ketersediaan informasi akuntansi yang tepat dan akurat, serta memastikan kepatuhan seluruh pegawai terhadap peraturan hukum dan undang-undang Islamiyah et al., (2020). Sistem pengendalian internal yang baik dapat menciptakan perilaku sumber daya manusia yang lebih disiplin dan bertanggung jawab, sehingga mampu meminimalkan resiko terjadinya kecurangan H. L. Putri et al., (2024). Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al., (2022) dan Kristuti et al., (2023) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat sebagai principals. Dari uraian tersebut, disusun hipotesis sebagai berikut:

H2: Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan

Pengaruh Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan

Whistleblowing merupakan salah satu prinsip penting dalam upaya pencegahan kecurangan, yang menekankan pembentukan mekanisme pelaporan kecurangan (*whistleblowing system*) serta pemberian perlindungan bagi pelapor agar berani mengungkapkan pelanggaran yang terjadi Taufik & Nasir, (2020). Penerapan *whistleblowing* dapat berfungsi sebagai *early warning system* yang membantu mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan sejak dini Kusuma Dewi & Padnyawati, (2022). Semakin tinggi tingkat pelaporan *whistleblowing* yang dilakukan, maka semakin besar pula peluang pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa H. L. Putri et al., (2024). Penelitian yang dilakukan oleh Suri Witari & Bayu Putra, (2023) dan Hariawan et al., (2020) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan, memperkuat akuntabilitas agen kepada principals. Dari uraian tersebut, disusun hipotesis sebagai berikut:

H3: *Whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan

Pengaruh Kompetensi Aparat Terhadap Pencegahan Kecurangan Yang Dimoderasi Moralitas Individu

Kompetensi merupakan kemampuan atau keahlian yang dimiliki individu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pekerjaan yang ditekuninya H. L. Putri et al., (2024). Namun, kompetensi yang tinggi tanpa disertai moralitas yang baik dapat disalahgunakan

untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, moralitas yang kuat serta sistem pengendalian internal yang handal diperlukan untuk mencegah terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan desa Taufik & Nasir, (2020). Penelitian yang dilakukan oleh Suhartono et al., (2023) dan H. L. Putri et al., (2024) menunjukkan bahwa moralitas individu mampu memoderasi pengaruh kompetensi aparat terhadap pencegahan kecurangan, di mana semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparat disertai moralitas yang baik, maka semakin besar kemampuannya dalam mencegah kecurangan keuangan desa. Dari uraian tersebut, disusun hipotesis sebagai berikut:

H4: Moralitas Individu memperkuat pengaruh antara kompetensi aparat terhadap pencegahan kecurangan

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Yang Dimoderasi Moralitas Individu

Pengendalian internal dirancang untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh moralitas individu yang menerapkannya Suasri, (2025). Moralitas yang tinggi tercermin dari kepatuhan pegawai terhadap kebijakan desa serta komitmen untuk menjaga aset keuangan desa dari penyalahgunaan Noya et al., (2023). Dengan demikian, moralitas berperan penting dalam memperkuat sistem pengendalian internal guna meminimalkan potensi terjadinya kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Noya et al., (2023) dan Saiselar et al., (2024) membuktikan bahwa moralitas mampu memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. Oleh karena itu, pengembangan moral dan etika perlu diintegrasikan dalam kebijakan organisasi untuk memperkuat integritas dan efektivitas pengendalian internal. Dari uraian tersebut, disusun hipotesis sebagai berikut:

H5: Moralitas Individu memperkuat pengaruh antara pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan

Pengaruh Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan Yang Dimoderasi Moralitas Individu

Whistleblowing merupakan sarana komunikasi bagi pihak internal organisasi untuk melaporkan tindakan kecurangan, pelanggaran hukum, pelanggaran terhadap kode etik, maupun benturan kepentingan yang dilakukan oleh pihak dalam organisasi D. S. P. Harahap et al., (2022). Penerapan sistem whistleblowing yang baik dapat meningkatkan efektivitas pencegahan penyalahgunaan, karena potensi pelanggaran dapat terdeteksi dan ditangani lebih cepat Nur & Urumsah, (2025). Penelitian yang dilakukan oleh Wayan, (2022) dan Taufik & Nasir, (2020) menunjukkan bahwa moralitas mampu memoderasi pengaruh whistleblowing terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi moralitas individu, semakin kuat efektivitas sistem whistleblowing dalam mendorong transparansi dan mengurangi resiko terjadinya kecurangan dalam organisasi. Dari uraian tersebut, disusun hipotesis sebagai berikut:

H6: Moralitas Individu memperkuat pengaruh antara whistleblowing terhadap pencegahan kecurangan

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan pada tahun 2025 dan menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner berbasis Google Form. Teknik pengambilan sampel digunakan adalah probability sampling, dengan jumlah responden sebanyak 66 aparatur desa. Instrumen penelitian diukur menggunakan skala likert, di mana setiap item pernyataan memiliki nilai bertingkat dari positif hingga negatif untuk memberikan skor pada respons yang diberikan. Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 27, menggunakan metode analisis regresi linear berganda dan moderated regression analysis (MRA) guna menguji hubungan dan pengaruh antar variabel penelitian secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif memberikan sebuah data yang diketahui nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Temuan analisis deskriptif terhadap variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Aparat	66	33.00	55.00	44.9242	4.23651
Pengendalian Internal	66	23.00	40.00	33.1061	3.83959
Whistleblowing	66	26.00	40.00	33.8333	2.79881
Pencegahan Kecurangan	66	18.00	30.00	25.1970	2.45087
Moralitas Individu	66	24.00	40.00	33.4394	3.91498
Valid N (listwise)	66				

Sumber: Data diolah peneliti

Kompetensi Aparat memiliki nilai minimum sebesar 33, nilai maksimum 55, nilai rata-rata 44,9242, sedangkan nilai standar deviasi 4,23651 yang berarti besarnya sebaran variabel kompetensi aparat sebesar 4,23651 dari 66 responden. Pengendalian Internal memiliki nilai minimum sebesar 23, nilai maksimum 40, nilai rata-rata 33,1061, sedangkan nilai standar deviasi 3,83959 yang berarti besarnya sebaran variabel pengendalian internal sebesar 3,83959 dari 66 responden.

Whistleblowing memiliki nilai minimum sebesar 26, nilai maksimum 40, nilai rata-rata 33,8333, sedangkan nilai standar deviasi 2,79881 yang berarti besarnya sebaran variabel whistleblowing sebesar 2,79881 dari 66 responden. Pencegahan Kecurangan memiliki nilai minimum sebesar 18, nilai maksimum 30, nilai rata-rata 25,1970, sedangkan nilai standar deviasi 2,45087 yang berarti besarnya sebaran variabel pencegahan kecurangan sebesar 2,45087 dari 66 responden.

Moralitas Individu memiliki nilai minimum sebesar 24, nilai maksimum 40, nilai rata-rata 33,4394, sedangkan nilai standar deviasi 3,91498 yang berarti besarnya sebaran variabel moralitas individu sebesar 3,91498 dari 66 responden.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis memiliki tujuan untuk menganalisis hubungan variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 2
Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.295	3.057		1.405	.165
	Kompetensi Aparat	.044	.091	.076	.486	.629
	Pengendalian Internal	.100	.101	.157	.994	.324
	Whistleblowing	.461	.098	.527	4.718	<.001

Sumber: Data diolah peneliti

Dilihat dari tingkat signifikansi 0,629, kompetensi aparat tidak memberikan pengaruh terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan alokasi dana desa. Oleh karena itu, hipotesis pencegahan kecurangan dipengaruhi melalui kompetensi aparat ditolak. Nilai signifikansi pengendalian internal 0,324 besar dari 0,05 menunjukkan bahwa secara statistik, pencegahan kecurangan pada pengelolaan alokasi dana desa tidak dipengaruhi dari pengendalian internal. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh whistleblowing diterima. 0,001 lebih kecil dari 0,05 disimpulkan pencegahan kecurangan dipengaruhi melalui whistleblowing. Oleh karena itu, hipotesis pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh whistleblowing diterima.

Tabel 3
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	176.817	3	58.939	17.106	<.001 ^b
	Residual	213.623	62	3.446		
	Total	390.439	65			

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan nilai F hasil perhitungan sebesar 17,106 beserta tingkat signifikansi $< ,001 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel kompetensi aparat, pengendalian internal, dan whistleblowing berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Hasil Moderate Regression Analysis (MRA)

Tabel 4
Hasil Uji t

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-15.858	16.697		-.950	.346
	Kompetensi Aparat	.459	.698	.793	.658	.513
	Pengendalian Internal	-.389	.747	-.609	-.521	.605
	Whistleblowing	.627	.893	.716	.702	.485
	Moralitas Individu	1.028	.503	1.642	2.043	.046
	Kompetensi	-.013	.020	-1.468	-.646	.521
	Aparat*Moralitas Individu					
	Pengendalian	.011	.022	1.081	.515	.608
	Internal*Moralitas Individu					
	Whistleblowing*Moralitas Individu	-.013	.026	-1.135	-.522	.603

Sumber: Data diolah peneliti

Nilai signifikansi variabel interaksi antara kompetensi aparat (X1) dan moralitas individu (Z) sebesar 0,521 ($> 0,05$) menunjukkan bahwa moralitas individu (Z) secara signifikan tidak mampu memoderasi hubungan antara kompetensi aparat (X1) terhadap pencegahan kecurangan (Y).

Nilai signifikansi variabel interaksi antara pengendalian internal (X2) dan moralitas individu (Z) sebesar 0,608 ($> 0,05$) menunjukkan bahwa moralitas individu (Z) secara signifikan tidak mampu memoderasi hubungan antara pengendalian internal (X2) terhadap pencegahan kecurangan (Y).

Nilai signifikansi variabel interaksi antara whistleblowing (X3) dan moralitas individu (Z) sebesar 0,603 ($> 0,05$) menunjukkan bahwa whistleblowing (X3) secara signifikan tidak mampu memoderasi hubungan antara whistleblowing (X3) terhadap pencegahan kecurangan (Y).

Pembahasan

Kompetensi Aparat Terhadap Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda terlihat bahwa variabel kompetensi aparat memiliki pengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan, dibuktikan dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,629 $> 0,05$ sehingga hipotesis kompetensi aparat tidak diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi aparat desa, justru dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan manipulasi laporan keuangan karena kemampuan tersebut Dewi Ayu Safitri et al., (2024). Kompetensi yang tinggi tidak menjamin pencegahan kecurangan apabila tidak diimbangi dengan moralitas, rasionalisasi yang rendah, serta lingkungan kerja yang mendukung integritas Eka Pramudita Sinaga, (2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Safitri et al., (2025) dan Yolanda & Putri, (2023) yang mengatakan bahwa kompetensi aparat tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda terlihat bahwa variabel pengendalian internal menunjukkan pengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan dengan nilai signifikansi sebesar 0,324 $> 0,05$ sehingga hipotesis kedua dinyatakan tidak diterima. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengendalian internal telah dirancang dengan baik, kecurangan masih dapat terjadi apabila terdapat individu yang menyalahgunakan wewenang dalam penerapannya Inna & Sulistiyantoro, (2023). Kondisi tersebut disebabkan oleh rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap pentingnya implementasi dan pemeliharaan sistem pengendalian internal yang efektif serta akuntabel H. L. Putri et al., (2024). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arianto et al., (2024) dan Kivaayatul Akhyaar et al., (2022) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda variabel whistleblowing memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ sehingga hipotesis ketiga dinyatakan diterima. Whistleblowing berperan penting dalam mencegah kecurangan, karena memberikan kesempatan bagi individu untuk melaporkan tindakan pelanggaran tanpa rasa takut terhadap ancaman atau tekanan Kurniadi et al., (2022). Apabila pemerintah desa menyediakan media komunikasi yang aman dan efektif untuk pelaporan, maka sistem whistleblowing dapat berfungsi optimal sebagai mekanisme pengawasan internal Rahayu et al., (2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hariawan et al., (2020) dan Bagus Fahreza et al., (2022) yang menyatakan bahwa penerapan whistleblowing secara efektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Moralitas Individu Memoderasi Kompetensi Aparat Terhadap Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan hasil uji pada Moderated Regression Analysis menunjukkan bahwa moralitas individu sebagai variabel moderasi tidak mampu memperkuat hubungan antara variabel kompetensi aparat terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji t pada variabel kompetensi aparat yang dimoderasi oleh moralitas individu dengan nilai signifikansi sebesar $0,521 > 0,05$ sehingga hipotesis keempat dinyatakan ditolak. Artinya, meskipun aparatur desa memiliki kompetensi yang tinggi, tanpa diimbangi dengan moralitas yang baik, kemampuan tersebut tidak digunakan secara etis dalam menjalankan tugasnya. Rendahnya kesadaran moral menyebabkan aparatur cenderung mengabaikan nilai kejujuran dan tanggung jawab, sehingga tindakan kecurangan dianggap hal yang wajar dalam lingkungan kerja. Akibatnya, tingkat pencegahan kecurangan menjadi rendah dan integritas organisasi melemah.

Moralitas Individu Memoderasi Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan hasil uji pada Moderated Regression Analysis menunjukkan bahwa moralitas individu sebagai variabel moderasi tidak mampu memperkuat pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji t pada variabel pengendalian internal yang dimoderasi oleh moralitas individu dengan nilai signifikansi sebesar $0,608 > 0,05$ yang berarti hipotesis kelima ditolak karena tidak terdapat pengaruh signifikansi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal yang disertai dengan rendahnya moralitas individu dapat membuka peluang terjadinya kecurangan dan menghambat efektivitas upaya pencegahan. Meskipun sistem pengendalian internal telah dirancang dengan baik, apabila moralitas aparatur desa rendah, maka sistem tersebut tidak dapat berfungsi secara optimal. Dengan demikian, moralitas individu tidak mampu memperkuat hubungan antara pengendalian internal dan pencegahan kecurangan.

Moralitas Individu Memoderasi Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan hasil uji Moderated Regression Analysis menunjukkan bahwa moralitas individu sebagai variabel moderasi tidak mampu memperkuat pengaruh whistleblowing terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji t pada variabel whistleblowing yang dimoderasi oleh moralitas individu dengan nilai signifikansi sebesar $0,603 > 0,05$ sehingga hipotesis keenam ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa moralitas individu tidak memiliki peran moderasi terhadap hubungan antara whistleblowing dan pencegahan kecurangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun seseorang memiliki integritas dan prinsip moral yang baik, faktor lain seperti efektivitas sistem whistleblowing, kebijakan organisasi, serta kondisi lingkungan eksternal justru lebih berpengaruh terhadap keberhasilan pencegahan kecurangan dibandingkan dengan pengaruh moralitas individu itu sendiri.

KESIMPULAN dan SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi aparat berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan, dan variabel pengendalian internal juga menunjukkan pengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan, sementara variabel whistleblowing berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Selanjutnya, moralitas individu sebagai variabel moderasi tidak mampu memperkuat pengaruh kompetensi aparat, pengendalian internal, maupun whistleblowing terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini

menunjukkan bahwa moralitas individu tidak berperan signifikan dalam memperkuat hubungan antara ketiga variabel utama dan upaya pencegahan kecurangan.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, peneliti selanjutnya bisa meningkatkan jumlah sampel atau memperluas cakupan wilayah penelitian agar hasil yang diperoleh lebih representatif. Kedua, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain di luar yang digunakan saat ini, seperti variabel transparansi dan akuntabilitas, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan kecurangan. Selain itu, peneliti selanjutnya penggunaan metode wawancara sebaiknya dilakukan guna memperkuat data kuesioner, karena metode tersebut dapat meminimalkan potensi ketidakjujuran responden. Selanjutnya, aparat desa diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang dilaksanakannya agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan akuntabel.

REFERENSI

- Affandi, M. T. Kurniawan. (2024). Implementasi Whistleblowing System dalam Meningkatkan Efektivitas Pengaduan Masyarakat (Studi Pada ACRC Korea). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(2), 153–161. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i2.3808>
- Arianto, P. I., Sumadi, N. K., & W, R. D. A. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi Dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 96–109. <https://doi.org/10.32795/hak.v5i3.5689>
- Astuti, V. O., Ani, M., & Amin, M. (2024). Pencegahan Kecurangan Dana Desa di Indonesia: Sensitivitas Moral Sebagai Variabel Moderasi. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 645–658. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Bagus Fahreza, M., Sadtyo Nugroho, W., & Hakim Purwantini, A. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo). *Busines and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 1–22. <https://journal.unimma.ac.id>
- Dewi Ayu Safitri, Siti Noor Khikmah, Yulinda Devi Pramita, Barkah Susanto, & Wawan Sadtyo Nugroho. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan Dana Desa dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi. *Dinamika Publik: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Bisnis*, 2(1), 132–149. <https://doi.org/10.59061/dinamikapublik.v2i1.615>
- Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, MORALITAS INDIVIDU, BUDAYA ORGANISASI, PRAKTIK AKUNTABILITAS, DAN WHISTLEBLOWING TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 327–340. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870>
- Eka Pramudita Sinaga, 2022. (2022). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal , Keadilan Organisasi , Kompetensi Aparatur , dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud*. 10(1). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1208>
- Faurozan, M., & Osmad, M. (2025). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa , Moralitas , dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Atas Dana Desa*. 16(2), 1138–1151.
- Harahap, D. S. P., Nasrizal, N., Indrawati, N., & Sandri, S. H. (2022). The Pengaruh Internal Audit Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderator (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Provinsi Riau). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 12(1), 82–91. <https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3065>

- Harahap, J. P. R., Habra, M. D., & Yulandari. (2021). Analisis Pencegahan Kecurangan Akuntansi Dalam Mengelola Dana Desa Pada Desa Melati Ii Kecamatan Perbaungan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 32–45. <https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6392>
- Hariawan, I. M. H., Sumadi, N. K., & Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 586–618. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.791>
- Hasibuan, H. T., Akuntansi, S., Fakultas, D., Dan, E., & Universitas, B. (2024). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa , Sistem Pengendalian Internal , Moralitas Individual , dan Locus Of Control Pada Pencegahan Fraud*. 1.
- Inna, I. Z., & Sulistiyantoro, D. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Informasi Desa, Kompetensi Ap Ara Tur Desa, Sistem Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Lnformasi, Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 185–199. <https://doi.org/10.25139/jaap.v7i2.6243>
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452>
- Juliandika, Fitri, A., Fadhlia, & Fitri. (2024). *Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu, dan*. 2(1), 82–96.
- Kivaayatul Akhyaar, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, & Wahyu Anggit Prasetya. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202–217. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217>
- Kristuti, G. M., Amalia, F. A., & Wicaksono, A. P. N. (2023). Determinan Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 23(1), 61. <https://doi.org/10.20961/jab.v23i1.916>
- Kurniadi, R., Suci, R. G., & Putri, A. M. (2022). Determinan Pencegahan Kecurangan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 10(2), 163–172. <https://jurnal.unigal.ac.id/edukasi/article/view/8630>
- Kusuma Dewi, N. L. G., & Padnyawati, K. D. (2022). Pengaruh Whistleblowing System, Good Government Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 334–344. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i4.3479>
- Kusumaningrum, R., & Wulandari, I. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 156–161. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Noya, J., Wilhelmina Silooy, R., & Benony Limba, F. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Desa-desa di Kecamatan Saparua). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(4), 278–292. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i4.1432>
- Nur, M., & Urumsah, D. (2025). Determinan Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa di Sulawesi Selatan. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 7, 74–82. <https://journal.uui.ac.id/NCAF/article/view/38693>

- Nurhayati, N. (2022). *Komitmen Organisasi , Pengendalian Internal , Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi*. 13, 114–136.
- Putri, A. Y. A., Irawan, D., & Widyastuti, A. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kecamatan Panekan. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 3(2), 71–90.
- Putri, H. L., Yuliani, N. L., Mranani, M., & Anisa, F. (2024). Analisis Determinan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas sebagai Moderasi. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 15(1), 33–50. <https://doi.org/10.18860/em.v15i1.21344>
- Rahayu, D., Rahmayati, A., & Narulitasari, D. (2022). Determinan Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen (SENAMA)*, 1(1), 73. <https://doi.org/10.52353/senama.v1i1.236>
- Rahmadani, A. P., Nugroho, G. W., & Martaseli, E. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *Akuntoteknologi*, 15(2), 34–47. <https://doi.org/10.31253/aktek.v15i2.2244>
- Rahmawati, D. F., Purnama, D., Puspasari, O. R., & Febriansyah, Y. (2023). Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat, Machiavellian Dan Pengawasan Bpd Terhadap Kecurangan Dana Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 9(2), 66–93. <https://doi.org/10.25134/jrka.v9i2.9149>
- Safitri, D. A., Khikmah, S. N., & Pramita, Y. D. (2025). *Peran Sistem Pengendalian Internal , Kompetensi Aparatur Desa dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa*. 21(01), 212–222.
- Saida, S., Maslichah, & Diah Fakhriyyah, D. (2023). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa di Kecamatan Pandaan). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 614–624. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Saiselar, S., Atarwaman, R., & Usmany, A. (2024). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DENGAN MORALITAS INDIVIDU SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA BANK DI KOTA AMBON). *Akuntansi*, 10, 21–39.
- Suasri, E. (2025). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal , Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi The Influence of Internal Control Systems and Whistleblowing Systems on*. 5321(1).
- Suhartono, Astrina, & Majid, J. (2023). Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi. *Accountia Journal*, 7(1), 18–35.
- Suri Witari, N. L. P., & Bayu Putra, C. G. (2023). Pengaruh Audit Internal, Whistleblowing System, dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 237–247. <https://doi.org/10.32795/hak.v4i2.3951>
- Susandya, A. A. P. G. B. A., Putra, M. D. P., Bagiana, I. K., Cahyani, M. R., & Aristanti, I. A. P. M. P. (2022). Determinan Pencegahan Kecurangan Dalam Alokasi Dana Desa. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(3), 659–671. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i3.22363>
- Taufik, T., & Nasir, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal,

dan Sistem Whistleblowing terhadap Pencegahan Kecurangan di Pemerintahan Desa dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Desa-Desa di Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227–237. <http://www.ejournal.pelitaIndonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

- Wakhidah, A. K., & Mutmainah, K. (2021). Bystander Effect, Whistleblowing System, Internal Locus of Control Dan Kompetensi Aparatur Dalam Pencegahan Fraud Dana Desa. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 3(1), 29–39. <https://doi.org/10.32500/jebe.v3i1.1993>
- Wayan, Y. (2022). Pengaruh Whistleblowing dan Penerapan Hukum Karma Phala pada Pencegahan Kecurangan dengan Moderasi Moralitas di LPD Se-Kota Denpasar. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 18(2), 175–184. <https://doi.org/10.31940/jbk.v18i2.175-184>
- Yolanda, O., & Putri, L. F. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Moralitas, Transparansi, Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Pengelolaan Dana Desa. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.